



Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

Homepage: <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/semnas-ps>

Vol. 3 No. 1, Desember 2025, halaman: 43-50

E-ISSN: xxxx-xxxx



Tren dan Tantangan Pemerataan Guru pada Daerah 3T di Indonesia: Narrative Literature Review 2015–2025

Andi Aswad Jahudin ^{1*}, Supadi ², Kamaludin ³, Linda Ika Mayasari ⁴

Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Indonesia

^{1*}Email penulis koresponden: andi.aswad@mhs.unj.ac.id

Riwayat Artikel

Submitted: 10-12-2025

Accepted: 20-12-2025

Published: 31-12-2025

Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

diterbitkan oleh Fakultas
Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Jakarta



Abstrak

Pemerataan guru di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih menjadi persoalan utama dalam pembangunan pendidikan nasional. Ketimpangan distribusi dan kualitas guru memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan terpencil. Berbagai kebijakan afirmatif seperti SM-3T dan Guru Garis Depan (GGD) telah diterapkan, namun efektivitasnya dalam meningkatkan retensi dan profesionalisme guru di wilayah 3T masih terbatas. Tujuan penelitian ini untuk memetakan tren dan tantangan pemerataan guru di Indonesia periode 2015–2025 melalui narrative literature review yang menganalisis 15 artikel ilmiah. Analisis konten tematik menunjukkan empat isu utama: distribusi dan kualitas guru, faktor struktural dan geografis, kesejahteraan dan motivasi, serta inovasi kebijakan dan digitalisasi pendidikan. Hasil kajian menegaskan adanya pergeseran kebijakan dari pendekatan afirmatif menuju restrukturisasi kelembagaan dan transformasi digital. Pemerataan guru membutuhkan pendekatan sistemik berbasis data, kesejahteraan, dan teknologi, serta penguatan Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) untuk mewujudkan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

Kata kunci: . pemerataan guru; kebijakan Pendidikan; kesejahteraan guru;

Abstract

The equitable distribution of teachers in frontier, outermost, and disadvantaged (3T) regions remains a major issue in national education development. Inequalities in teacher distribution and quality continue to widen the gap in educational outcomes between urban and remote areas. Various affirmative policies such as SM-3T and Guru Garis Depan (GGD) have been implemented, yet their effectiveness in improving teacher retention and professionalism in 3T regions remains limited. This study maps trends and challenges in teacher distribution in Indonesia during the 2015–2025 period through a narrative literature review that analysed 15 scientific articles. Thematic content analysis identifies four main issues: teacher distribution and quality, structural and geographical factors, welfare and motivation, and policy innovation and educational digitalisation. The findings indicate a policy shift from affirmative approaches toward institutional restructuring and digital transformation. Achieving teacher equity requires a systemic, data-driven approach supported by improved welfare and technology, including the strengthening of the National Teacher Equity System (SPGN) to ensure more equitable and inclusive education.

Keywords: teacher equity; education policy; teacher welfare; digital transformation.

PENDAHULUAN

Pemerataan tenaga pendidik masih menjadi isu strategis dalam pembangunan pendidikan nasional karena secara langsung menentukan kualitas dan keadilan layanan pendidikan di Indonesia. Ketimpangan distribusi guru antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil menyebabkan kesenjangan mutu pendidikan yang terus berlanjut (Rahabav et al., 2021). Studi yang dilakukan oleh Kawuryan et al. (2021) menunjukkan bahwa guru berkualitas cenderung terkonsentrasi di daerah urban, sementara sekolah di wilayah rural dan 3T masih mengalami kekurangan guru yang memenuhi kualifikasi. Kondisi ini diperburuk oleh faktor geografis dan infrastruktur yang sulit dijangkau, sehingga banyak guru enggan ditempatkan di daerah terpencil (Haekal, 2022). Penelitian lain menegaskan bahwa ketimpangan sumber daya manusia pendidikan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya pemerataan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di Indonesia (Sriyani & Wibowo, 2024).

Ketimpangan distribusi tenaga pendidik yang telah diuraikan sebelumnya tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran, tetapi juga memperdalam kesenjangan pendidikan antarwilayah, terutama selama masa krisis seperti pandemi COVID-19. Alifah (2020) menyoroti bahwa ketimpangan pendidikan yang sudah ada semakin melebar selama pandemi COVID-19 akibat keterbatasan teknologi dan distribusi tenaga pendidik di wilayah 3T. Meski pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan afirmatif seperti Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T) dan Guru Garis Depan (GGD), pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan koordinasi dan keterbatasan insentif di tingkat daerah (Rachmah et al., 2025). Oleh karena itu, pemerataan guru di daerah 3T menjadi agenda penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kendati pemerataan guru di wilayah 3T telah menjadi fokus kebijakan pendidikan nasional, efektivitas program-program afirmatif yang telah diluncurkan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Hal ini tercermin dalam sejumlah studi menunjukkan bahwa kebijakan seperti Guru Garis Depan (GGD) dan Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T) memang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah guru di daerah terpencil, namun belum diikuti oleh peningkatan kualitas, motivasi, dan keberlanjutan penugasan (Pratiwi et al., 2022; Rachmah et al., 2025). Sebagian guru yang ditugaskan melalui program tersebut tidak mampu bertahan lama di lokasi penempatan karena keterbatasan fasilitas, kesejahteraan yang rendah, serta akses infrastruktur yang sulit (Haekal, 2022). Selain itu, kajian oleh Rahabav et al. (2021) mengungkap bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan kebijakan redistribusi guru berjalan parsial, tanpa mekanisme evaluasi berbasis data kebutuhan lokal.

Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya integrasi kebijakan pendidikan dengan konteks sosial dan geografis daerah 3T, sehingga beberapa program bersifat *top-down* dan kurang adaptif terhadap karakteristik lokal (Wika, 2025). Ketimpangan digital juga menjadi tantangan baru dalam pemerataan pendidikan, karena sebagian besar sekolah di wilayah 3T belum memiliki akses internet yang memadai dan guru masih memiliki literasi digital yang rendah (Rohmani et al., 2025; Alifah, 2020). Dengan demikian, problem pemerataan guru di Indonesia tidak hanya terkait aspek jumlah dan sebaran, tetapi juga menyangkut dimensi struktural, kompetensi profesional, dan kesiapan teknologi.

Kenyataan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan pemetaan sistematis terhadap literatur yang membahas pemerataan guru di daerah 3T selama satu dekade terakhir (2015–2025), guna memahami sejauh mana tren kebijakan, tantangan implementasi, serta arah perbaikan yang telah diidentifikasi oleh berbagai studi. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pemerataan guru di Indonesia dari beragam perspektif, namun sebagian besar masih bersifat terfragmentasi dan parsial. Sebagian studi hanya menyoroti aspek jumlah dan rasio distribusi guru tanpa melihat keterkaitannya dengan kualitas, kesejahteraan, atau kebijakan pendidikan yang melingkupinya (Rahabav et al., 2021; Sriyani & Wibowo, 2024). Kajian lain berfokus pada efektivitas program afirmatif seperti GGD dan SM-3T, tetapi belum menelusuri dampaknya secara longitudinal terhadap keberlanjutan penugasan guru di daerah 3T (Pratiwi et

al., 2022). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Haekal (2022) dan Wika (2025) menyoroti aspek geografis dan kelembagaan, namun belum mengaitkannya secara sistematis dengan faktor kebijakan, teknologi, dan motivasi profesional guru.

Dari sisi kebijakan, studi-studi terdahulu juga menunjukkan minimnya integrasi antara kebijakan pusat dan daerah, sehingga distribusi guru cenderung mengikuti logika administratif, bukan kebutuhan berbasis data spasial (Rachmah et al., 2025). Sementara itu, Rohmani et al. (2025) dan Alifah (2020) menegaskan bahwa kesenjangan digital memperlebar ketimpangan mutu pendidikan di daerah 3T, namun belum ada penelitian yang secara komprehensif mengaitkan persoalan ini dengan redistribusi guru dan kebijakan pendidikan nasional. Dengan demikian, literatur yang ada masih belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola tren, tantangan multidimensional, dan arah kebijakan pemerataan guru di Indonesia dalam konteks satu dekade terakhir.

Kesenjangan tersebut menjadi landasan utama penelitian ini, yang bertujuan untuk melakukan kajian sistematis berbasis *narrative literature review* terhadap literatur ilmiah periode 2015–2025. Kajian ini difokuskan pada pemetaan tren, identifikasi tantangan, serta perumusan strategi pemerataan distribusi guru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan menghimpun hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam satu kerangka tematik, studi ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang dinamika pemerataan guru dan kesenjangan kebijakan pendidikan di wilayah 3T Indonesia. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memetakan secara sistematis tren dan tantangan pemerataan guru di daerah 3T selama satu dekade penuh (2015–2025) menggunakan metode *narrative literature review*. Rentang waktu tersebut mencakup tiga fase penting perubahan kebijakan pendidikan Indonesia: (1) fase kebijakan afirmatif awal melalui program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T) dan Guru Garis Depan (GGD), (2) fase restrukturisasi rekrutmen guru melalui ASN-PPPK, serta (3) fase transformasi digital pasca-pandemi COVID-19 yang mengubah paradigma pemerataan tenaga pendidik (Alifah, 2020; Rachmah et al., 2025). Dengan demikian, periode ini bukan sekadar rentang waktu panjang, melainkan menggambarkan transisi struktural dan paradigmatik dalam kebijakan pemerataan guru di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya bersifat deskriptif dan terfokus pada satu wilayah atau program, studi ini mengintegrasikan berbagai temuan lintas konteks dan lintas tahun ke dalam empat kategori tematik utama: (1) distribusi dan kualitas guru, (2) faktor struktural dan geografis, (3) kesejahteraan dan motivasi guru, serta (4) inovasi kebijakan pemerataan. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan sintesis literatur yang lebih luas, tetapi juga mengungkap dinamika temporal dan kebijakan yang membentuk pemerataan guru di daerah 3T. Selain itu, dengan penggunaan empat kata kunci terfokus (distribusi guru, daerah 3T, kebijakan pendidikan, dan tantangan Pendidikan), penelitian ini menyajikan peta literatur konseptual dan empiris yang dapat menjadi acuan strategis bagi peneliti dan pembuat kebijakan. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang pemerataan guru di wilayah 3T melalui pendekatan sistematis yang mengaitkan kebijakan pendidikan, konteks sosial, dan perubahan teknologi secara terpadu dalam satu dekade terakhir.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan secara sistematis tren dan tantangan pemerataan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) di Indonesia selama periode 2015–2025 menggunakan pendekatan *narrative literature review*. Melalui telaah literatur ilmiah yang terpublikasi dalam kurun waktu satu dekade terakhir, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan distribusi dan kualitas guru, faktor struktural dan geografis, kesejahteraan serta motivasi guru, hingga inovasi kebijakan pemerataan yang diterapkan di daerah 3T. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kecenderungan temporal dan dinamika kebijakan yang menunjukkan pergeseran dari kebijakan afirmatif menuju transformasi digital pendidikan, serta menelusuri tantangan dan kesenjangan implementasi yang masih menghambat efektivitas pemerataan tenaga pendidik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menyusun peta konseptual pemerataan guru yang komprehensif,

sekaligus memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual, berkelanjutan, dan berbasis bukti di wilayah 3T Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *narrative literature review* untuk memetakan tren dan tantangan pemerataan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) di Indonesia dalam kurun waktu 2015–2025. Pendekatan ini dipilih karena bersifat deskriptif kualitatif dan eksploratif, dengan tujuan menelusuri serta menggambarkan pola temuan dari berbagai hasil penelitian sebelumnya tanpa melakukan uji hipotesis. Sumber data diperoleh melalui Google Scholar dengan empat kata kunci utama, yaitu distribusi guru, daerah 3T, kebijakan pendidikan, dan tantangan pendidikan. Kriteria inklusi meliputi artikel empiris yang fokus pada pemerataan guru di daerah 3T Indonesia yang terbit antara 2015-2025. Dari hasil penelusuran awal sebanyak 50 artikel, dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel non-empiris (seperti opini); (2) fokus di luar konteks guru di daerah 3T Indonesia; dan (3) teks lengkap tidak tersedia. Proses ini menghasilkan 22 artikel relevan, dan akhirnya 15 artikel dinyatakan memenuhi kelayakan untuk dianalisis. Proses ekstraksi data dilakukan secara manual melalui tabel sintesis literatur yang memuat nama penulis, tahun, metode penelitian, temuan utama, tantangan yang diidentifikasi, dan rekomendasi kebijakan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis isi tematik (*thematic content analysis*), dengan langkah: (1) mengidentifikasi ide dan isu berulang dari kolom temuan dan tantangan (*open coding*), (2) mengelompokkan hasilnya ke dalam empat kategori besar, yaitu distribusi dan kualitas guru, faktor struktural dan geografis, kesejahteraan dan motivasi guru, serta inovasi kebijakan pemerataan (*axial coding*), dan (3) menyusun pola keterkaitan antartema menjadi sintesis konseptual tentang tren dan tantangan pemerataan guru di daerah 3T (*selective coding*). Dengan metode yang dirancang secara transparan dan sistematis ini, penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti lain yang ingin meneliti isu serupa dalam konteks geografis atau kelembagaan yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis konten tematik ini mengidentifikasi empat tema utama yang menggambarkan dinamika pemerataan guru di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) di Indonesia selama satu dekade terakhir, yaitu: (1) distribusi dan kualitas guru, (2) faktor struktural dan geografis, (3) kesejahteraan dan motivasi guru, dan (4) inovasi kebijakan dan transformasi digital. Tema-tema ini disusun berdasarkan pemetaan sistematis terhadap isi dari masing-masing artikel, yang telah dikodekan dan dikategorikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Temuan Utama Berdasarkan Kategori Tema

No	Penulis (Tahun)	Fokus Utama atau Temuan	Tema Dominan
1	Kadir & Wibowo (2024)	Ketimpangan distribusi guru antar kecamatan; dominasi guru honorer dan rendahnya kualifikasi guru di wilayah terpencil.	Distribusi dan Kualitas Guru
2	Rahabav et al. (2021)	Kekurangan guru PNS, mismatch antar mata pelajaran, dan lemahnya kebijakan penempatan guru di daerah Maluku.	Distribusi dan Kualitas Guru
3	Kawuryan et al. (2021)	Peningkatan kualifikasi guru belum sejalan dengan pemerataan; guru berkualitas masih terkonsentrasi di perkotaan.	Distribusi dan Kualitas Guru

4	Rachmah et al. (2025)	Redistribusi guru dan pembangunan infrastruktur digital menjadi pendekatan baru untuk mengurangi disparitas pendidikan di 3T.	Inovasi dan Transformasi Digital
5	Rohmani et al. (2025)	Pelatihan berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor meningkatkan efektivitas pengajaran di daerah terpencil.	Inovasi dan Transformasi Digital
6	Haekal (2022)	Distribusi guru dipengaruhi faktor struktural dan geografis seperti akses transportasi, jarak antarsekolah, dan minimnya fasilitas.	Faktor Struktural dan Geografis
7	Susanto et al. (2025)	Tantangan utama peningkatan kualitas guru meliputi kesejahteraan rendah, minimnya pelatihan, dan beban administratif.	Kesejahteraan dan Motivasi Guru
8	Dewi et al. (2025)	Profesionalisme guru di daerah 3T menurun akibat rendahnya motivasi dan fasilitas pendukung yang terbatas.	Kesejahteraan dan Motivasi Guru
9	Wika, (2025)	Kebijakan pemerataan pendidikan tidak kontekstual terhadap kondisi sosial-budaya dan geografis wilayah terpencil (Merauke).	Faktor Struktural dan Geografis
10	Rahmawati (2022)	Mengusulkan <i>Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN)</i> sebagai solusi sistemik ketimpangan distribusi dan motivasi guru di daerah 3T.	Distribusi dan Kualitas Guru

Beberapa kutipan naratif yang mendukung temuan dalam analisis ini adalah sebagai berikut: (1) Ketimpangan distribusi guru di wilayah terpencil masih tinggi, di mana dominasi guru honorer dan rendahnya kualifikasi tenaga pendidik menghambat peningkatan mutu pendidikan dasar (Kadir & Wibowo, 2024); (2) Implementasi kebijakan distribusi guru di Maluku belum efektif karena lemahnya manajemen penempatan dan koordinasi lintas instansi (Rahabav et al., 2021); (3) Pemerataan guru belum berjalan optimal karena guru dengan kualifikasi tinggi masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara sekolah di daerah kecil mengalami kekurangan tenaga pendidik (Kawuryan et al., 2021); (4) Transformasi digital melalui redistribusi guru berbasis teknologi menjadi langkah strategis dalam mengatasi disparitas pendidikan di wilayah 3T (Rachmah et al., 2025); (5) Pelatihan guru berbasis literasi digital dan budaya lokal efektif meningkatkan kompetensi pedagogis guru di daerah terpencil (Rohmani et al., 2025); (6) Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi penghambat utama pemerataan tenaga pendidik, terutama di wilayah kepulauan dan pegunungan (Haekal, 2022); (7) Tantangan kesejahteraan, beban kerja administratif, serta minimnya pelatihan menjadi faktor yang menurunkan motivasi dan kualitas profesionalisme guru (Susanto et al., 2025); (8) Rendahnya insentif dan fasilitas menyebabkan guru di daerah 3T enggan bertahan lama, sehingga menghambat keberlanjutan pendidikan (Dewi et al., 2025); (9) Kebijakan pemerataan guru sering kali tidak kontekstual dengan kondisi sosial dan geografis lokal, sehingga implementasinya tidak adaptif terhadap realitas lapangan (Wika, 2025); (10) Usulan *Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN)* dinilai dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi ketimpangan distribusi dan meningkatkan motivasi guru di daerah 3T (Rahmawati, 2022).

Berikut adalah bagan yang menunjukkan distribusi frekuensi dari tema-tema utama berdasarkan artikel yang telah dianalisis:

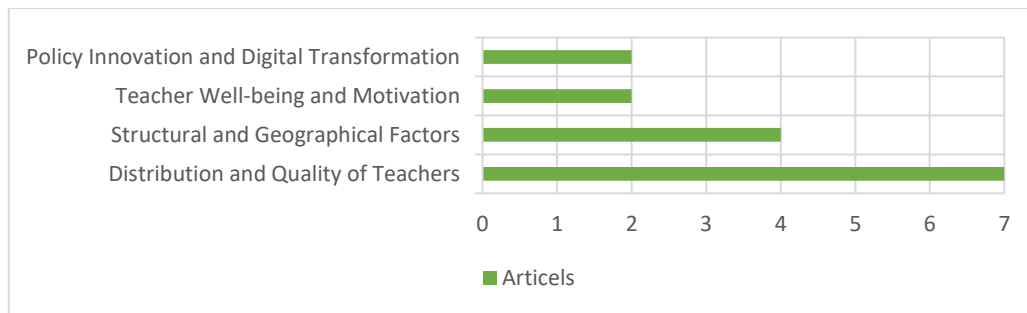


Figure 1. Tema Dominan dalam Penelitian

Pembahasan

Hasil *narrative literature review* terhadap lima belas artikel selama satu dekade terakhir (2015–2025) menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan guru di Indonesia mengalami perubahan orientasi yang signifikan. Kebijakan yang semula bersifat afirmatif dan kuantitatif kini berkembang menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan, adaptif, dan berorientasi digital. Perubahan ini mencerminkan respons sistem pendidikan terhadap tantangan struktural, geografis, dan sosial yang dihadapi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Analisis tematik dalam penelitian ini mengidentifikasi empat fokus utama yang saling berkelindan, yaitu: distribusi dan kualitas guru, faktor struktural dan geografis, kesejahteraan dan motivasi guru, serta inovasi kebijakan dan transformasi digital.

Pada periode awal 2015–2019, kebijakan pemerataan guru masih berorientasi pada pemenuhan jumlah tenaga pendidik melalui program afirmatif seperti SM-3T dan Guru Garis Depan (GGD). Program ini berhasil meningkatkan jumlah guru di daerah 3T, namun sebagian besar penelitian, seperti yang dilakukan oleh Rahabav et al. (2021) dan Kawuryan et al. (2021), menunjukkan bahwa keberlanjutan dan retensi guru masih menjadi masalah utama. Banyak guru tidak bertahan lama di daerah penugasan karena terbatasnya insentif, sarana, dan peluang karier. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn, (2017) yang menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak cukup diukur dari implementasi awal, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu beradaptasi dan dipertahankan dalam sistem sosial tempat ia dijalankan. Dengan kata lain, kebijakan afirmatif yang bersifat sementara cenderung menyentuh gejala, bukan akar masalah dari ketimpangan distribusi guru.

Memasuki fase kedua, yaitu periode 2020–2022, arah kebijakan mulai bergeser dari sekadar redistribusi tenaga pendidik menuju peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru melalui rekrutmen ASN–PPP dan penguatan sistem karier. Sejumlah penelitian dalam rentang ini menyoroti bahwa motivasi dan kinerja guru di daerah 3T sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan ekonomi, beban administratif, dan peluang pengembangan profesional (Dewi et al., 2025; Kadir & Wibowo, 2024b; Susanto et al., 2025). Kondisi ini dapat dijelaskan melalui Herzberg et al. (2017) dalam *Two-Factor Theory*, yang menegaskan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu *hygiene factors* (gaji, kondisi kerja, kebijakan organisasi) dan *motivator factors* (pengakuan, tanggung jawab, dan pengembangan diri). Dalam konteks guru di daerah 3T, rendahnya faktor higienis seperti fasilitas dan insentif menyebabkan rendahnya kepuasan dan loyalitas kerja. Oleh karena itu, kebijakan pemerataan guru perlu disertai dengan strategi kesejahteraan dan dukungan profesional yang menyeluruh, bukan hanya memperbanyak jumlah tenaga pendidik.

Periode berikutnya, yakni 2023–2025, menandai fase transformasi kebijakan menuju era digitalisasi pendidikan. Pemerintah mulai mengintegrasikan teknologi informasi dalam sistem pendidikan dan redistribusi guru. Transformasi digital ini membuka peluang baru dalam pemerataan akses pembelajaran dan pelatihan berbasis daring bagi guru di wilayah terpencil. Namun demikian, kesenjangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur internet menjadi tantangan baru dalam implementasinya (Rachmah et al., 2025; Rohmani et al., 2025). Fenomena ini sesuai dengan teori *Diffusion of Innovation* dari Lee, (2024), yang menjelaskan bahwa adopsi inovasi tidak berlangsung seragam di setiap komunitas, tergantung pada kesiapan sumber daya

dan dukungan lingkungan. Guru di wilayah perkotaan cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi dibandingkan guru di wilayah 3T yang menghadapi hambatan infrastruktur dan kompetensi digital. Oleh karena itu, pemerataan guru di masa kini tidak lagi hanya berkaitan dengan mobilitas fisik tenaga pendidik, melainkan juga pemerataan kemampuan, literasi digital, dan akses terhadap sumber daya pendidikan modern.

Untuk memperjelas hubungan antara tujuan penelitian dan hasil temuan narrative literature review dalam konteks temporal, berikut disajikan tren keterkaitan tujuan dan temuan (2015–2025) yang merangkum tiga fase utama kebijakan pemerataan guru di daerah 3T:

Tabel 2. Tren Keterkaitan Tujuan dan Temuan (2015–2025)

Periode Kebijakan	Fokus & Temuan Utama	Keterkaitan dengan Tujuan Penelitian
2015–2019 (<i>Fase Afirmasi Awal</i>)	Pemerintah menjalankan program SM-3T dan GGD untuk menutupi kekurangan guru di daerah 3T. Temuan menunjukkan peningkatan jumlah guru, tetapi retensi dan kesejahteraan rendah.	Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi tren awal pemerataan guru tercapai; namun ditemukan celah kebijakan dalam keberlanjutan dan kualitas tenaga pendidik.
2020–2022 (<i>Fase Restrukturisasi Kebijakan</i>)	Fokus kebijakan bergeser ke ASN-PPPK dan peningkatan kesejahteraan. Studi menunjukkan motivasi guru dipengaruhi faktor higienis (gaji, fasilitas) dan motivator (pengakuan, tanggung jawab).	Tujuan menelusuri tantangan struktural dan motivasional tercapai; hasil mendukung teori Herzberg tentang retensi kerja di lingkungan marginal.
2023–2025 (<i>Fase Transformasi Digital</i>)	Pemerintah mulai mengintegrasikan transformasi digital pendidikan. Guru di 3T masih menghadapi keterbatasan literasi digital dan akses internet.	Tujuan mengkaji inovasi kebijakan dan transformasi digital terjawab; temuan menegaskan pentingnya pemerataan akses teknologi bagi guru di wilayah terpencil.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat dilihat bahwa arah kebijakan pemerataan guru di Indonesia mengalami pergeseran dari pendekatan afirmatif menuju restrukturisasi kelembagaan, dan akhirnya bertransformasi ke arah digitalisasi pendidikan. Ketiga fase ini menggambarkan evolusi sistem kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam teori perubahan pendidikan oleh Fullan (2016), yang menekankan pentingnya keseimbangan antara perubahan struktural dan kultural dalam reformasi pendidikan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa masalah pemerataan guru tetap kompleks dan bersifat multidimensi. Ketimpangan distribusi tenaga pendidik tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan jumlah, tetapi juga oleh hambatan struktural, geografis, dan sosial yang saling terkait. Berdasarkan kerangka Checkland, (1981) tentang *systems thinking*, persoalan pemerataan guru perlu dilihat sebagai sistem terpadu yang terdiri dari subsistem kebijakan, kesejahteraan, pelatihan, dan infrastruktur digital. Setiap subsistem saling memengaruhi dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang efektif harus bersifat sistemik dan adaptif, melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat pendidikan di tingkat akar rumput.

Pendekatan sistemik tersebut dapat diterapkan melalui tiga strategi utama. Pertama, memperkuat pengelolaan berbasis data spasial dan kebutuhan lokal, sehingga redistribusi guru lebih tepat sasaran. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan motivasi profesional guru, agar tenaga pendidik tidak hanya datang tetapi juga bertahan dan berkembang di daerah 3T. Ketiga, memperluas integrasi transformasi digital dalam pelatihan dan supervisi pendidikan, agar guru di wilayah marginal dapat terlibat aktif dalam pembelajaran abad ke-21. Semua strategi ini sejalan dengan prinsip Dunn (2017) tentang *evidence-based policy*, yakni bahwa kebijakan publik yang

efektif harus didasarkan pada analisis empiris, evaluasi berkelanjutan, dan pemahaman sistem sosial secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pemerataan guru di Indonesia tidak bisa lagi dipahami sebagai isu distribusi semata, tetapi sebagai bagian dari upaya sistemik untuk menciptakan keadilan pendidikan yang berkelanjutan. Pemerataan guru yang efektif menuntut transformasi paradigma: dari penempatan ke pemberdayaan, dari afirmasi ke profesionalisasi, dan dari mobilitas fisik ke pemerataan digital. Dengan demikian, arah kebijakan ke depan perlu menempatkan guru sebagai subjek utama perubahan, bukan sekadar pelaksana kebijakan yang memiliki kapasitas, kesejahteraan, dan akses terhadap teknologi yang memadai.

KESIMPULAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemerataan guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya menyangkut jumlah dan distribusi tenaga pendidik, tetapi juga aspek struktural, kesejahteraan, dan literasi digital. Secara teoretis, temuan ini memperkuat gagasan *systems thinking* bahwa kebijakan pemerataan guru perlu dilihat sebagai sistem terpadu yang mencakup subsistem kebijakan, pelatihan profesional, dan infrastruktur teknologi. Integrasi teori motivasi kerja dan difusi inovasi menegaskan bahwa keberhasilan pemerataan guru bergantung pada keseimbangan antara faktor kesejahteraan, dukungan organisasi, dan kesiapan terhadap perubahan berbasis teknologi. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian menegaskan bahwa pemerataan guru telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan afirmatif menuju transformasi digital pendidikan. Namun, perubahan ini belum sepenuhnya meningkatkan retensi dan motivasi guru di daerah 3T. Implementasi kebijakan redistribusi guru masih menghadapi hambatan koordinasi antarlembaga, ketimpangan fasilitas, serta keterbatasan akses teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang menekankan pada analisis kebutuhan lokal dan evaluasi berkelanjutan, agar intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab konteks sosial dan geografis wilayah terpencil.

Berdasarkan hasil sintesis, direkomendasikan agar pemerintah memperkuat Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) berbasis data spasial untuk mendukung redistribusi guru yang lebih efisien dan berkeadilan. Selain itu, diperlukan kebijakan insentif dan pengembangan karier yang mendorong guru tetap bertugas di daerah 3T, serta perluasan pelatihan berbasis teknologi yang adaptif terhadap keterbatasan konektivitas. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, universitas, dan masyarakat lokal harus diperkuat untuk menjamin implementasi kebijakan yang kontekstual dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemerataan guru tidak hanya dipahami sebagai penempatan tenaga pendidik, tetapi sebagai proses transformasi sistem pendidikan menuju keadilan, profesionalisme, dan keberlanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, U. (2020). *COVID-19 Widening Indonesia's Education Gap*. SMERU Research Intitute. <https://smeru.or.id/en/article/covid-19-widening-indonesia's-education-gap>
- Checkland, P. (1981). *No Title Systems thinking, systems practice*. John Wiley & Sons.
- Dewi, D. A. P., Syamsinar, T., Sagita, W. R., & Jeni, F. (2025). Tantangan Profesionalisme Guru Di Daerah 3T (Tertinggal , Terdepan , Terluar) : Kajian Literatur Terhadap Ketimpangan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 83–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1053>
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach*, sixth edition. In *Public Policy Analysis: An Integrated Approach, Sixth Edition* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Haekal, M. (2022). Tantangan Distribusi Guru di Daerah Terpencil Indonesia : Antara Manajemen , Isu Personal , dan Faktor Geografi. *Ta'dib: Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 12(June), 2089–4422. <https://doi.org/https://doi.org/10.54604/tdb.v12i1.100>
- Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (2017). The Motivation to Work. In *The Motivation*

- to Work. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.4324/9781315124827>
- Kadir, W. S., & Wibowo, U. B. (2024a). Balancing the Scales: Achieving Equitable Teacher Distribution in Wajo Regency's Elementary Schools. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(2), 2558–2570. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.5113>
- Kadir, W. S., & Wibowo, U. B. (2024b). Balancing the Scales: Achieving Equitable Teacher Distribution in Wajo Regency's Elementary Schools. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(2), 1447–1460. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.5113>
- Kawuryan, S. P., Sayuti, S. A., Aman, & Dwiningrum, S. I. A. (2021). Teachers quality and educational equality achievements in indonesia. *International Journal of Instruction*, 14(2), 811–830. <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14245a>
- Lee, J. W. (2024). Diffusion of innovations. In *Encyclopedia of Sport Management, Second Edition* (5th ed.). Free Press. <https://doi.org/10.4337/9781035317189.ch157>
- Pratiwi, E. Y. R., Suryanti, & Wiryanto. (2022). Evaluasi Program Guru Garis Depan Terhadap Kualitas Guru Sekolah Dasar Di Daerah 3T. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 810–818. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2615>
- Rachmah, N., Tresna, I. C., & Tommi. (2025). Government Efforts To Realise Educational Equity Through Teacher Redistribution and Digital Infrastructure Improvement: a Literature Review on Strategies and Challenges in Reducing Urban and Rural Educational Disparities in Indonesia. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(3), 677–686. <https://www.injoe.org/index.php/INJOE/article/view/261>
- Rahabav, P., Sangaji, I., Tahapary, P., & Aponno, E. N. (2021). Teacher-Equalization-Policy Implementations in Maluku Province. *Proceedings of the International Conference on Educational Sciences and Teacher Profession (ICETeP 2020)*, 532, 362–371. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210227.061>
- Rahmawati, A. P. (2022). Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) Sebagai Sistem Penyebaran Guru Untuk Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah 3T. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 5(2), 293. <https://doi.org/10.20961/shes.v5i2.59337>
- Rohmani, Z., Agus Budiana, A., Subhani, A., Hamzanwadi, U., & Timur, L. (2025). Pendidikan di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal): Kondisi dan Harapan. *Eduversity: Journal of Future Interdisciplinary Education*, 1(1), 2020–2025. <https://gumpublisher.id/index.php/ijfie/article/view/4/6>
- Sriyani, W., & Wibowo, U. B. (2024). Balancing The Scales: Achieving Equitable Teacher Distribution in Wajo Regency's Elementary Schools. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 16(2), 1447–1460. <https://doi.org/https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.3058>
- Susanto, A., Diana, S., Mumtahanah, H. A., Wahyudin, W., Mulyani, D. T., & Alandes, P. (2025). Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia: Tantangan dan Upaya Pemecahannya Melalui Kebijakan. *Hijri: Jurnal Manajemen Kependidikan Dan Keislaman*, 14(1), 166–176. <http://dx.doi.org/10.30821/hijri.v14i1.24679>
- Wika, M. (2025). Antara Komitmen dan Realita: Studi Kualitatif Terhadap Kebijakan Pemerataan Pendidikan di Wilayah Terpencil Merauke. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 89–96. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.376>

BIODATA PENULIS KORESPONDEN



Andi Aswad Jahudin, S.Pd., Menyelesaikan pendidikan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Buton dan lulus pada tahun 2022. Sedang menempuh pendidikan Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Telepon: +62 821 9836 8579